

---

## Jurnal Paradigma Multidisipliner (JPM)

---

### PELAKSANAAN PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PADA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BANJARNEGARA

*Planning, Evaluation And Reporting In The Banjarnegara DPRD Secretariat*

**Kristia Ningsih**

Universitas Tidar

tianingk@gmail.com

---

#### **Abstrak**

Tujuan dilaksanakannya penelitian ini untuk menganalisis bagaimana pelaksanaan Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan yang ada di Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan tipe deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dengan teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara kepada Kasubag dan staff perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perencanaan, evaluasi, dan pelaporan Sekretariat DPRD masih belum maksimal terutama dalam pelaksanaan pelaporan.

**Kata kunci:** Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan

#### **Abstract**

*The purpose of this research is to analyze how the implementation of Planning, Evaluation and Reporting in the Banjarnegara District Parliament Secretariat. The study uses qualitative methods with descriptive type. The data used in this study are primary data with data collection techniques using interview methods to the Head of Subdivision and planning, evaluation and reporting staff as well as document studies. The results showed that the implementation of planning, evaluation, and reporting of the DPRD Secretariat was still not optimal, especially in the implementation of reporting.*

**Keywords:** Planning, Evaluation, Reporting

---

## **PENDAHULUAN**

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD, yang berkedudukan di bawah serta bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD. Dalam mendukung pelaksanaan tugas, Sekretariat DPRD memiliki bagian-bagian yang didalamnya terdapat sub bagian (subag), diantara sub bagian (subag) tersebut adalah subag perencanaan, evaluasi dan pelaporan (PEP).

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan dibentuk berdasarkan ("Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara," 2017). Dalam melaksanakan tugas Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan (PEP) memiliki beberapa tugas yakni menyiapkan bahan perumusan perencanaan sampai evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan program kerja di lingkungan DPRD dan Sekretariat DPRD.

Dalam Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara, setiap tahunnya ada banyak program yang direncanakan baik yang sifatnya dibiayai pemerintah daerah maupun kabupaten/kota, maka pelaksanaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan sangat penting dilakukan agar pelaksanaan program tersebut dapat berhasil dan berjalan sesuai dengan program yang telah direncanakan. Sehingga dengan tercapainya program tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat serta hasil dari pelaksanaan program tersebut dapat menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan bagi pemangku kepentingan untuk mengambil kebijakan ditahun berikutnya agar pelaksanaan program lebih baik lagi serta memberikan manfaat dan terciptanya kesejahteraan bagi masyarakat.

Pelaksanaan perencanaan, evaluasi, dan pelaporan di Sekretariat DPRD terutama dalam hal penyusunan pelaporan dirasa belum optimal. Dari hasil uraian latar belakang tersebut, maka penelitian tentang pelaksanaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan di Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis bagaimana pelaksanaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan di Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara.

## **LANDASAN TEORI**

### **Perencanaan**

Setiap organisasi pasti mempunyai tujuan, sehingga dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan tersebut dibutuhkan sebuah perencanaan (planning). Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 "perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah".

Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa pentingnya sebuah perencanaan dalam suatu organisasi, karena perencanaan merupakan dasar dan pedoman untuk menentukan keberhasilan organisasi. Pentingnya perencanaan juga dikemukakan oleh (Hasibuan, 2006) yaitu: 1) Tanpa perencanaan tidak ada tujuan yang ingin dicapai; 2) Tanpa perencanaan tidak ada pedoman pelaksanaan sehingga akan banyak pemborosan; 3) Perencanaan merupakan dasar pengendalian, tanpa ada rencana pengendalian tidak dapat dilakukan; 4) Tanpa perencanaan, tidak ada keputusan dan proses manajemen.

### **Evaluasi**

Tak kalah penting dari perencanaan, evaluasi dalam organisasi juga diperlukan. Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 “evaluasi merupakan suatu pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif”. Sehingga berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya evaluasi merupakan proses penilaian terhadap suatu program kegiatan yang dilakukan. Dalam suatu organisasi kegiatan evaluasi sangat penting bagi berjalannya suatu program, tujuan dari diadakannya evaluasi sendiri yaitu untuk melihat apakah program yang dijalankan sudah sesuai perencanaan, apakah sudah sesuai dengan target atau tujuan program tersebut, atau justru tidak sama sekali.

Pentingnya evaluasi juga dikemukakan oleh (Katsioloudes, 2006) bahwa setelah keputusan pilihan strategis, rencana strategis dirumuskan, dan strategi telah dilaksanakan, masih ada keputusan penting yang dibutuhkan untuk memastikan sukses suatu perencanaan. Agar organisasi dapat memantau kinerja dan mengambil tindakan korektif maka evaluasi strategi serta proses pengendalian perlu dilakukan. Evaluasi dan pengendalian diperlukan agar permasalahan dapat diatasi dengan tepat dengan melakukan pemantauan secara terus menerus terhadap seluruh perumusan dan pelaksanaan tahapan perencanaan.

### **Pelaporan**

Tahap akhir dari pelaksanaan suatu program yaitu dilaksanakannya pelaporan. Pelaporan menurut (Gulick, L., & Urwick, 2004) dalam bukunya yang berjudul *Papers on the Science of Administration* mengartikan pelaporan merupakan salah satu fungsi manajemen yang berupa penyampaian

perkembangan, hasil kegiatan atau pemberian keterangan mengenai segala hal yang berkaitan dengan tugas serta fungsi kepada pejabat yang lebih tinggi.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dalam pelaksanaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan di Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara menggunakan deskriptif kualitatif. Penggunaan pendekatan kualitatif dimaksudkan untuk memberikan uraian yang mendalam tentang tulisan, ucapan maupun perilaku yang dapat diamati dari individu maupun kelompok. Sedangkan penggunaan jenis penelitian deskriptif kualitatif dimaksudkan untuk memberikan deskripsi dan menganalisis pelaksanaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang ada di Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara.

### **Waktu dan Tempat Penelitian**

Kegiatan penelitian dilaksanakan di Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara dan waktu pelaksanaan penelitian ini selama 1 (satu) bulan yakni dari Januari hingga Februari 2020.

### **Target/Subjek Penelitian**

Fokus dari penelitian ini yaitu berpusat pada pengkajian pelaksanaan perencanaan, evaluasi, dan pelaporan di Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara dan subjek dari penelitian ini yaitu pegawai atau staff subag perencanaan, evaluasi, dan pelaporan (PEP) Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara, yang terdiri dari kasubag dan dua staff perencanaan, evaluasi, dan pelaporan (PEP).

### **Data, Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data**

Sumber data penelitian ini berupa data primer, yang diperoleh dari pihak-pihak

terkait yakni kasubag dan staff perencanaan, evaluasi, dan pelaporan (PEP). Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini yakni dengan teknik wawancara dan observasi. Pengumpulan dengan teknik wawancara dengan melakukan tanya jawab secara langsung kepada pihak terkait dalam hal ini Kasubag dan Staff Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara.

Sedangkan pengumpulan data dengan menggunakan teknik observasi, dilakukan dengan pengamatan secara langsung terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Subag perencanaan, evaluasi, dan pelaporan (PEP) Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara.

#### **Teknik Analisis Data**

Penelitian ini bersifat kualitatif, maka untuk menganalisis data penulis menggunakan metode analisis kualitatif dimana data yang telah terkumpul dalam penelitian ini diolah dan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan kata-kata yang disusun kedalam teks.

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **Hasil Penelitian**

Pelaksanaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara, merupakan sebuah aktivitas yang saling berkaitan dengan keseluruhan aktivitas penyelenggaraan pemerintahan yang ada di Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara.

Temuan hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perencanaan, evaluasi, dan pelaporan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara dapat dideskripsikan sebagai berikut.

- Keterbatasan staf dan beban kerja yang berat menjadikan perencanaan, evaluasi dan pelaporan berjalan kurang optimal.

- Kendala yang dihadapi dalam perencanaan, evaluasi dan pelaporan yaitu kurangnya komunikasi dan kordinasi antar bagian, sehingga dalam pelaksanaan pelaporan menjadi terlambat.

Lebih lanjut hasil penelitian perencanaan, evaluasi dan pelaporan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara dapat dideskripsikan secara detail sebagai berikut.

#### **Pelaksanaan Perencanaan**

Ruang lingkup tugas perencanaan meliputi kegiatan penyusunan konsep Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), rencana strategis (RENSTRA), penyusunan rencana kerja (RENJA), Indikator Kinerja Utama (IKU), dan Perjanjian Kinerja (PK).

RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan jangka waktu lima tahun yang didalamnya berisi penjabaran tentang visi dan misi, serta program dari kepala daerah yang terpilih dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Tahap penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah sebagai berikut :

- a. Tahap ersiapan;
- b. Tahap penyusunan rancangan awal RPJMD;
- c. Tahap penyusunan rancangan awal Renstra PD;
- d. Tahap penyusunan rancangan akhir RPJMD/Renstra PD;
- e. Tahap penyusunan rancangan akhir RPJMD;
- f. Penetapan Perda/Perkada tentang RPJMD.

Tahap selanjutnya yang dilakukan yaitu menyusun Rencana Strategis atau Renstra yaitu dokumen perencanaan untuk jangka waktu lima tahun. Rencana Strategis (Renstra) memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah dengan berpedoman pada RPJMD. Sedangkan proses penyusunan renstra perangkat daerah meliputi:

1. Tahap persiapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah;
2. Tahap penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah;
3. Tahap penyusunan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah dan;
4. Tahap penetapan Renstra Perangkat Daerah.

Dalam Penyusunan rencana strategis mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, serta RPJMD Kabupaten Banjarnegara.

Berdasarkan hasil pengamatan penulis ditempat penelitian dan hasil wawancara dengan staff Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan (PEP) bahwa Rencana Strategis (Renstra) dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang disusun setiap tahun. Selain itu Rencana Strategis juga dijadikan sebagai acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan, baik berupa evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Perangkat Daerah.

Sedangkan Rencana Kerja Perangkat Daerah atau Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk jangka waktu satu tahun. Rencana Kerja (Renja) disusun sebagai dasar serta pedoman arah dan target pencapaian pembangunan selama satu tahun kedepan. Adapun proses dalam penyusunan Renja adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan kegiatan musrenbang, mulai dari Musrenbang Kecamatan sampai Musrenbang Kabupaten.
2. Jadwal pelaksanaan kegiatan Musrenbang RKPD adalah sebagai berikut:
  - a. Kegiatan musrenbang kecamatan diselenggarakan pada bulan Februari;
  - b. Forum SKPD dilaksanakan minggu ke I pada bulan Maret;
  - c. Kegiatan musrenbang kabupaten dilaksanakan minggu ke III pada bulan Maret.

Hasil wawancara dengan salah satu staff Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan menyatakan bahwa penyusunan Renja Perangkat Daerah merupakan suatu proses yang berjalan dan bertahap serta harus sejalan dengan penyusunan dan penetapan RPJM Daerah. Selain itu juga disesuaikan dengan arah kebijakan daerah, isu strategis dan kondisi sosial politik yang ada di daerah tersebut khususnya Kabupaten Banjarnegara. Setelah Renja ditetapkan dan disahkan, selanjutnya rencana kerja (Renja) tersebut perlu dijabarkan lagi kedalam target program dan kegiatan. Dalam rencana kerja (Renja) tahunan tersebut, lebih terperinci lagi memuat target pada masing-masing kegiatan. Hal tersebut dijadikan sebagai patokan dan dasar dalam pelaksanaan di masing-masing kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Selanjutnya tugas perencanaan yaitu penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), berdasarkan ("Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 83 Tahun 2017 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2022," 2017), "Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Banjarnegara merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Pemerintah

Kabupaten Banjarnegara untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kinerja dan Anggaran, menyusun Dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banjarnegara”.

Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara terdiri dari dua sasaran dengan masing-masing sasaran memiliki indikator dan target, yaitu:

1. Meningkatnya kapasitas anggota DPRD dan Aparatur Pemerintah Daerah yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, dengan indikator sebagai berikut.
  - a. Persentase Perda yang ditetapkan sesuai dengan propemperda (target 100%) yang terdiri dari :
    - Jumlah Perda yang di tetapkan dalam 1 tahun  $\times 100\%$
    - Jumlah target Perda yang di tetapkan sesuai dengan Propem perda
  - b. Rata-rata persentase kehadiran masyarakat pada kegiatan – kegiatan yang di selenggarakan oleh DPRD antara lain publik hearing dan saba desa (target 70%)
    - Rata-rata jumlah masyarakat yang hadir  $\times 100\%$
    - Rata-rata jumlah masyarakat yang di undang
2. Meningkatnya nilai survey kepuasan masyarakat, dengan indikator sebagai berikut.
  - a. Nilai survey kepuasan masyarakat (target 75%) yang terdiri dari :
    - Total nilai persepsi per unsur  $\times$  nilai tertimbang
    - Total unsur yang terisi

- b. Nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (target Cc)

Sedangkan dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan maka dibuat perjanjian Kinerja (PK), keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab setiap staff atau karyawan.

Dapat disimpulkan bahwa Subag Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan (PEP) pada Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara dalam melakukan tugas perencanaan, setiap tahapan telah dilakukan dengan baik sesuai dengan peraturan dan pedoman yang berlaku.

### **Pelaksanaan Evaluasi**

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kasubag Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan (PEP) menyatakan bahwa sebagai bentuk evaluasi atas pelaksanaan tugas yang sudah dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara dalam rangka peningkatan pelaksanaan kerja, maka dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara tahun lalu dan Capaian Renstra Sekretariat DPRD. Hasil evaluasi rencana kerja tahunan yang telah dilaksanakan dapat dijadikan sebagai tolok ukur menuju ke arah yang lebih baik sehingga rencana kerja yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya akan lebih selektif, terarah, dan berkesinambungan dengan rencana setrategis Kabupaten Banjarnegara.. Secara umum pelaksanaan evaluasi di Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara sudah terlaksana dengan baik.

### **Pelaksanaan Pelaporan**

Ruang lingkup tugas pelaporan yaitu menyusun Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Pengendalian Operasional Kegiatan (POK) dan sebagai bentuk pertanggungjawaban Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara atas kinerja yang telah dilaksanakan, maka Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Menurut (“Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah,” 2008) “sistem pengendalian intern pemerintah atau SPIP yaitu sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah”. Sedangkan tujuan dari SPIP sendiri yaitu untuk meyakinkan tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Sedangkan penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan kewajiban bagi Sekretariat DPRD pada setiap akhir tahun anggaran sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara selama satu tahun anggaran berjalan. Tujuan dari Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dibuat setiap tahun sekali yaitu untuk digunakan sebagai dasar evaluasi terhadap Kinerja Organisasi Perangkat Daerah, sehingga tingkat capaian dari kinerja yang telah dilaksanakan dalam satu tahun dapat dipantau secara bertahap.

Dalam LKjIP Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara menyajikan hasil pengukuran kinerja kegiatan-kegiatan yang dibiayai dari APBD dan P-APBD, dengan berdasarkan tolak ukur Rencana Strategis (Renstra) dan penetapan kinerja, kemudian

dievaluasi tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran dengan menyajikan informasi yang berisi tentang pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, realisasi pencapaian indikator kerja, penjelasan memadai atas pencapaian kinerja serta perbandingan capaian indikator kinerja sampai tahun berjalan dengan target kinerja lima tahunan yang telah direncanakan.

Berdasarkan hasil wawancara didapatkan hasil bahwa dalam penyusunan laporan masih bersifat manual dan dalam menyusun diberi waktu serta terdapat tenggat waktu, mengingat laporan digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas, fungsi dan pelaksanaan program yang telah dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD. Oleh karena itu, penyusunan laporan diusahakan selesai tepat waktu. Namun pada kenyataannya, pelaksanaan pelaporan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara tidak tepat waktu yang disebabkan karena keterlambatan penyeteroran laporan dari masing-masing bagian.

Hasil wawancara dengan staff Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan (PEP) menyatakan bahwa faktor penyebab keterlambatan penyusunan pelaporan yaitu karena kurangnya komunikasi dan kordinasi antar bagian di Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara sehingga menyebabkan keterlambatan penyeteroran laporan dari masing-masing bagian, selain itu juga disebabkan karena keterbatasan staff dengan beban yang berat sehingga pelaksanaan pelaporan kurang optimal.

## **Pembahasan**

### **Pelaksanaan Perencanaan**

Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara dalam melaksanakan tugas perencanaan sudah terlaksana dengan baik. Dalam melaksanakan tugas Subag Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan (PEP) utamanya dalam melaksanakan perencanaan,

bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan (PEP) melakukan beberapa langkah untuk mencapai tujuannya seperti dalam menyusun Renstra mengacu pada prosedur dan peraturan yang ada seperti tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati Banjarnegara, RPJMD Kabupaten Banjarnegara.

Sedangkan dalam menyusun rencana kerja (RENJA) mengacu pada prosedur yang ada serta melaksanakan kegiatan Musrenbang mulai dari Musrenbang Kecamatan sampai Musrenbang Kabupaten diselenggarakan tepat waktu sesuai jadwal.

### **Pelaksanaan Evaluasi**

Melalui hasil wawancara yang diperoleh dari staff perencanaan, evaluasi, dan pelaporan penulis menganalisis bagaimana pelaksanaan evaluasi di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banjarnegara, bahwa dalam penyusunan evaluasi setiap tahapan telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan.

Pelaksanaan evaluasi dilaksanakan dalam rangka peningkatan pelaksanaan kerja, agar rencana kerja yang akan dilaksanakan Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara lebih selektif, terarah, dan berkesinambungan dengan rencana setrategis Kabupaten Banjarnegara, maka pelaksanaan evaluasi berpedoman pada aturan yang ada dan mengacu pada rencana kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara tahun lalu dan Capaian Renstra Sekretariat DPRD.

### **Pelaksanaan Pelaporan**

Pada Subag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan (PEP) Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara didukung oleh aspek SDM yakni Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 2 orang, dan Tenaga Honorer sebanyak 1 orang. Seperti yang kita ketahui bahwa aspek sumber daya manusia (SDM) dalam suatu organisasi sangat

penting terutama dibutuhkan untuk kemajuan organisasi tersebut serta berpengaruh terhadap keefektifan kegiatan di dalam organisasi.

Dengan keterbatasan sumber daya manusia (SDM) tersebut, maka dalam menyusun pelaporan dilakukan beberapa langkah untuk mencapai tujuan pelaporan agar selesai tepat waktu. Adapun langkah-langkah tersebut antara lain, meningkatkan komunikasi dan kordinasi antar bagian terkait pelaporan, meminta pelaporan pada masing-masing bagian sebelum tenggat waktu serta melakukan pengumpulan pelaporan dari masing-masing bagian tanpa terkecuali sebelum tenggat waktu.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Hasil dari penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pelaporan di Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara masih belum maksimal. Adapun penyebab ketidakmaksimalan tersebut dikarenakan keterlambatan penyeteroran laporan dari masing-masing bagian, serta kurangnya staff analis yang ada di bagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan sehingga mengakibatkan pelaporan terkendala dan tidak tepat waktu.

### **Saran**

Berdasarkan dari hasil, pembahasan, dan kesimpulan penelitian. Saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut :

1. Perlunya penyesuaian jadwal pelaksanaan laporan di masing-masing lini atau bagian.
2. Perlunya penambahan personil atau staff sesuai spesifikasi tugas pada bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan (PEP).
3. Komunikasi antar bagian harus lebih intens terutama mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Subag Perencanaan,



Evaluasi, dan Pelaporan (PEP) seperti mengenai masalah pelaporan.

4. Tingkat koordinasi antar lini atau bagian harus lebih intens.

### **Implikasi dan Keterbatasan**

Berdasarkan dari hasil, pembahasan, dan kesimpulan penelitian. Saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut :

1. Perlunya penyesuaian jadwal pelaksanaan laporan di masing-masing lini atau bagian.
2. Perlunya penambahan personil atau staff sesuai spesifikasi tugas pada bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan (PEP).
3. Komunikasi antar bagian harus lebih intens terutama mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Subag Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan (PEP) seperti mengenai masalah pelaporan.
4. Tingkat koordinasi antar lini atau bagian harus lebih intens.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Gulick, L., & Urwick, L. (2004). *Papers on the Science of Administration*. Routledge.
- Hasibuan, M. S. P. (2006). *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Katsioloudes, M. I. (2006). *Strategic Management: Global Cultural Perspectives for Profit and Non-Profit Organizations*. San Francisco: Elsevier Butterworth Heinemann Publications.
- Permendagri No. 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. (2017). [Http://Ditjenpp.Kemenkumham.Go.Id](http://Ditjenpp.Kemenkumham.Go.Id), Nomor 65(879), 2004-2006.
- <https://doi.org/10.1093/bioinformatics/btko45>
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. (2008). <Http://Www.Bpkp.Go.Id>.
- Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara. (2017). <Https://Jdih.Banjarnegarakab.Go.Id>.
- Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 83 Tahun 2017 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2022. (2017). <Https://Jdih.Banjarnegarakab.Go.Id>.
- Rencana Kerja (Renja) Tahun 2020 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara. (2019). <Https://Dprd.Banjarnegarakab.Go.Id>, 4, 1-34.
- Indikator Kinerja Utama. (2018). <Https://Dprd.Banjarnegarakab.Go.Id>, (1), 75.